

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL



**RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL**
Jl. Abuman No. 72 Pageruyung (51361)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal didasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 yaitu Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian.

Penetapan Kinerja Tahun 2025 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Pageruyung pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi Camat serta dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan yang akan datang.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pageruyung, Maret 2024
CAMAT PAGERUYUNG

CASPURI,S.Sos.

Pembina Tk.I

NIP. 19670917 198607 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	20
2.3 Prestasi yang di capai di Tahun 2023	24
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	28
2.5 Review Terhadap Rancangan RKPD	33
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	41
3.3 Program Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	62
Lampiran - lampiran	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tb.T-C.29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Kec. Pageruyung	14
Tb.T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pageruyung Kabupaten Kendal	22
Tb.T-C.31	Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Kecamatan Pageruyung	35
Tb.T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	37
Tb.T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal	45
Tabel	Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Pageruyung	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Penghargaan Capaian PBB	24
Gambar 2 Penghargaan Juara 1 Kontingen Terbaik dan Juara 3 Video Kreatif Jambore Karang Taruna Tingkat Kabupaten Kendal 13-14 Juni 2023	25
Gambar 3 Penghargaan Kecamatan dengan Predikat Sangat Baik atas Laporan Pengawasan Kearsipan Internal Kab. Kendal 19 Oktober 2023	26
Gambar 4 Juara 1 Bola Volly Putri Kejuaraan Antar Kampung Kemenpora 15 - 18 September 2023	27
Gambar 5 Juara Favorit Lomba Sosiodrama Pola Asuh Anak dan Remaja PKK se Kab Kendal 10 Desember 2023	28
Gambar 6 Juara II Lomba K3 Destinasi Pariwisata Jambore PKK tk Kab. Kendal 10 Desember 2023	29
Gambar 7 Penghargaan Juara 1, 2 dan 3 pada Festival Ds. Wisata Tingkat Kab. Kendal (5-6 Agt 2023)	30
Gambar 8 Peringkat 3 pengelolaan Desa dan Kelurahan Online Kendal Terintegrasi (DOKAR) Tahun 2022, tanggal 30 Januari 2023	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya guna perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

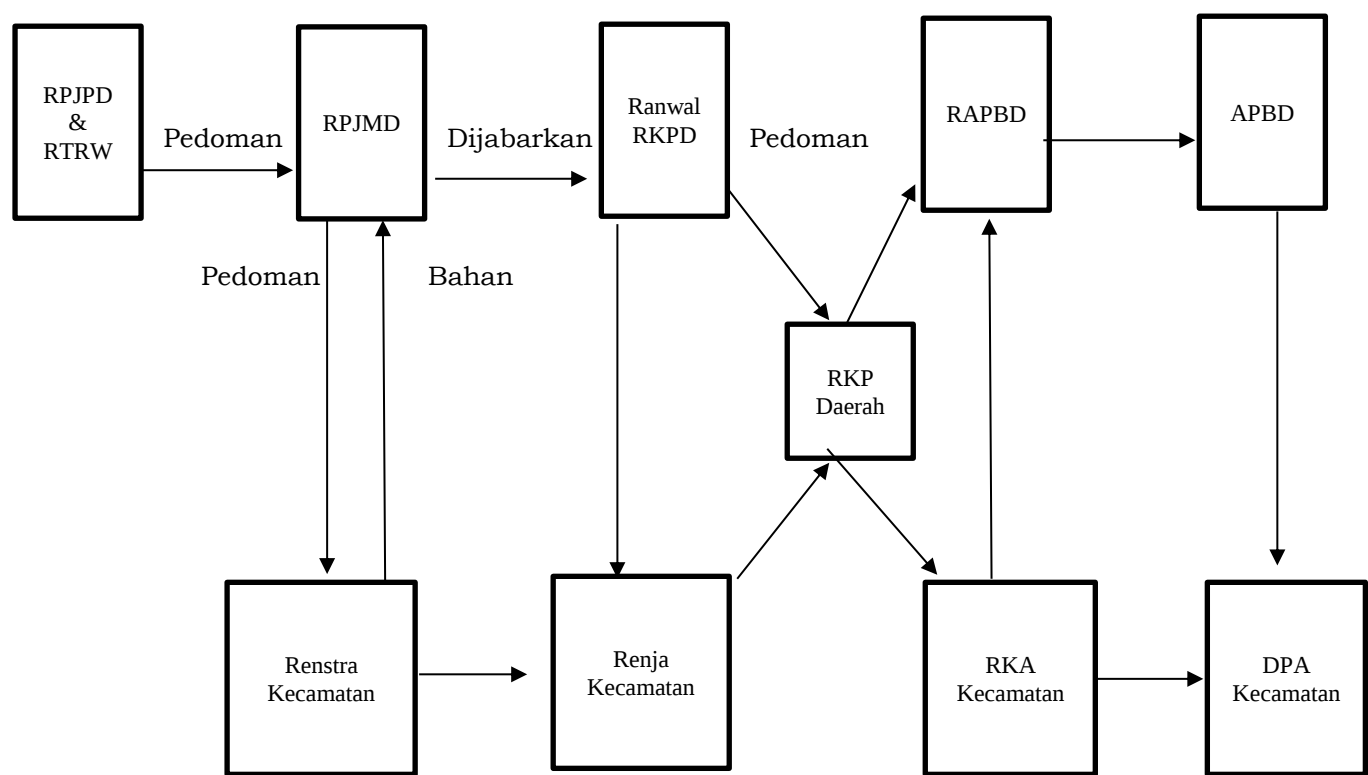
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 - 2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2025. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 adalah **“Menuju Kendal Inclusive 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian”**. Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

1.1.1. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi

Kecamatan Pageruyung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Pageruyung dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2025.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pageruyung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pageruyung untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2025, dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.
4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pageruyung tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025;
5. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2025 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisi mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

daerah, review terhadap terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bagian ini memaparkan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2023 Kecamatan Pageruyung melaksanakan 5 program dan 12 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2023 dapat terealisasi rata-rata 96%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/ kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 96%. Kegiatan telah tercapai 100%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2 = 2023$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jumlah program Tahun 2023 ada 5 program, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target dari program tersebut adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 88% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut sebesar Rp 2.810.170.450,00 terealisasi sebesar Rp 2.486.521.758,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100 %.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target dari Program tersebut adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut

sebesar Rp 34.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 29.825.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 86%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Target dari Program tersebut adalah Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100% terealisasi sebesar 94% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersebut sebesar Rp 65.762.000,00 terealisasi sebesar Rp 62.194.600,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 95%.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dari Program tersebut adalah Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut sebesar Rp 95.894.000,00 terealisasi sebesar Rp 95.289.668,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target dari Program tersebut adalah Persentase penyusunan APBDes tepat waktu sebesar 100% dan terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp 106.690.525,00 terealisasi sebesar Rp. 96.104.850,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90%.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan.

Kegiatan Tahun 2023 jumlahnya ada 12 Kegiatan, sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100% dan terealisasi sebanyak 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.715.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 79%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah selama 14 bulan dan terealisasi sebesar 14 bulan atau tingkat capaian kinerja 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 2.101.628.925,00 terealisasi sebesar Rp 1.833.042.215,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 87%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 181.191.500,00 terealisasi sebesar Rp. 168.026.101,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 93%.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah gedung yang diperbaiki 2 unit dan terealisasi sebesar 2 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 99%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 34.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.716.216,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99%.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selama sebanyak 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 90%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 106.716.000,00 terealisasi sebesar Rp. 96.446.388,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90%.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah gedung yang diperbaiki 2 unit dan terealisasi sebesar 2 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 83%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan

tersebut sebesar Rp. 37.120.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.689.420,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 83%.

7) Penataan Organisasi

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan sebanyak 60 orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.420.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.420.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

8) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan target 100 orang tercapai 100 orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 34.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.825.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 86%.

9) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 14 desa dan terealisasi sebesar 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 65.762.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.194.600,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 95%.

10) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah pembinaan anggota linmas sebanyak 30 orang linmas dan terealisasi 30 orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 83.304.000,00 terealisasi sebesar Rp. 83.239.968,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

11) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang dimonitor dalam kegiatan pengawasan wilayah sebanyak 14 desa dan terealisasi 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut

sebesar Rp. 12.590.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.050.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 96%.

12) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 14 desa dan terealisasi 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 90%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 106.690.525,00 terealisasi sebesar Rp. 96.104.850,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90%.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** berikut:

Tabel T-C 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pageruyung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	)Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	98	100	96	96	100	100	100
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	89,3	100	96	96	100	100	100
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	0	0	0	100	100	100
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah	100	100	100	99	99	100	100	100

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	100	100	96	96	100	100	100
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	98,6	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.13	Penataan Organisasi	Prosentase capaian kegiatan peningkatan kinerja	100	98,6	100	100	100	100	100	100
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	100	100	94	94	100	100	100
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	14 kali	14 kali	100	94	94	100	100	100
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	12 kali	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	12 kali	12 kali	100	100		100	100	100

7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	100	100	90		100	100	100
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	14 Desa	14 Desa	100	90		100	100	100

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Semua program dan kegiatan tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) secara fisik, dan realisasi anggaran tercapai 88.16 %
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2023 yang terealisasi sesuai dengan target kinerja 100% dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Program/Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan perangkat Daerah	100	88	88
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	2 dok	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	87	87
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	87
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Petugas ASN	12 dok	12 dok	92
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	93	93
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	91
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	94
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu	12	12	100

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan BBM dan perjalanan dinas	12	12	91
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99	99
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 unit	5 unit	99
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	90	90
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai	300	300	97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan belanja rekening listrik, air dan telpon	12	12	78
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor	12	12	91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan kantor	5 orang	5 orang	99
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab dan diperbaiki	5 unit	5 unit	99
g	Penataan Organisasi	Prosentase terpenuhinya pelayanan umum	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	86	86
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	86	86
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perijinan	100	86	86
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	95	95
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	14	14	95
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan musrenbang	14	14	94

	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dok	1 Dok	98
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monitoring dan evaluasi kegiatan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa	14	14	94
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	99	99
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12	12	96
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor	14	14	96
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi	12	12 kali	100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	90	90
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14	14	90
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah APBDes yang disusun	14	14	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	14	14	93

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	14	14	89
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	14	14	100

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.
 - Adanya reconfusing anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana atau capaian kinerja tidak maksimal;
 - Keterbatasan SDM dengan volume kegiatan yang kurang seimbang mempengaruhi hasil kinerja
 - Keterbatasan fasilitas dan fasilitasi dari dinas terkait sehingga kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia untuk dapat mencapai hasil yang maksimal
 - Adanya regulasi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan mengalami perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
 Target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (renja) sehubungan dengan perkembangan kebutuhan baik dari segi anggaran maupun kegiatan di wilayah.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah;
 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada prioritas kegiatan sesuai visi misi daerah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pageruyung

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
 5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pageruyung dapat dilihat dari **Tabel T-C.30** berikut.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	93	100	100	100	
2	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	87	100	100	100	
4	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Prosentase pemenuhan jasa penunjang			100	100	100	100	90	100	100	100	
6	Prosentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	83	100	100	100	
7	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Prosentase terpenuhinya layanan umum			100	100	100	100	100	100	100	100	

9	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD			100	100	100	100	39	100	100	100	
12	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	39	100	12 kali	12 kali	
13	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	100	12 kali	12 kali	
15	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	100	12 kali	12 kali	
16	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100	100	100	90	100	100	100	
	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa			14 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa	100	100	14 Desa	14 Desa	

2.3 Prestasi yang dicapai pada tahun 2023

Dalam kurun waktu tahun 2023 Kecamatan Pageruyung memperoleh beberapa prestasi, sebagai berikut :

1. Penghargaan Juara II Kecamatan dengan Persentase Evaluasi Desa Pilot Project Keluarga sehat Tangguh dan Tanggap Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2023.
2. Juara II Posyandu Tingkat Kabupaten Kendal
3. Juara III Penyuluhan P4GN dan Tamu Kader PKK Tingkat Kab. Kendal tgl 10 Desember 2023

Gambar 1

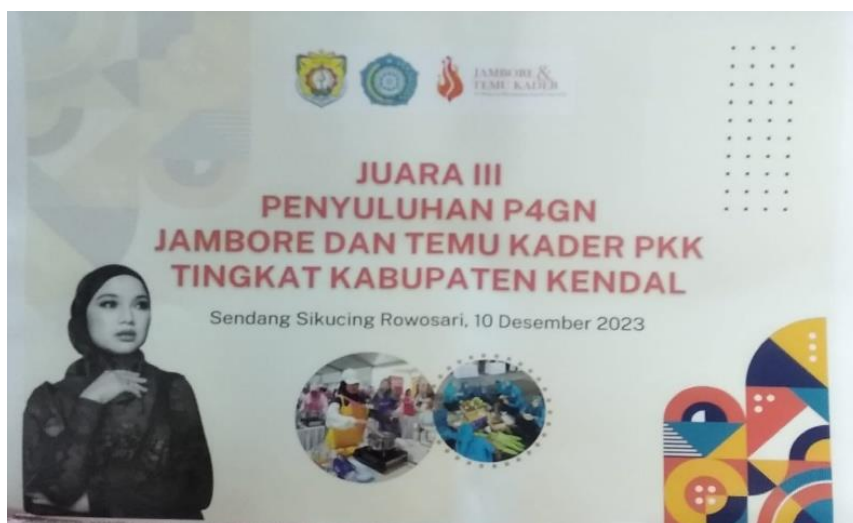
Penghargaan Capaian juara II Pelaksana posyandu terbaik Tk. Kabupaten



Gambar 2.
Juara III Penyuluhan P4GN dan Tamu Kader PKK Tingkat Kab.
Kendal
tgl 10 Desember 2023



Gambar 3
Penghargaan Kecamatan dengan Predikat Sangat Baik atas Laporan
Pengawasan Kearsipan Internal Kab. Kendal 19 Oktober 2023



2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di Kecamatan Pageruyung dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap seksi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dengan beban kerja yang banyak.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pageruyung secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1}. Peraturan Desa

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum dan esensi yang diatur.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- Memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sosialisasi Produk Hukum dengan sasaran Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
- Pembinaan Anggota BPD selaku Badan Pengawas Desa yang membantu mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2}. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Redaksional penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD, mekanisme kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

yang menunjang pelaporan ADD dan DD serta Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan tersebut untuk seluruh Desa banyak yang belum dioperasionalkan secara optimal. Upaya yang telah dilakukan mengenai Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD dengan **Aplikasi Silakus**

3}. *Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa*

Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana TIK yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengadakan pembinaan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa;
- Pembinaan administrasi desa dan aset desa;
- Peningkatan kinerja pemerintahan desa;
- Peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja pemerintahan desa;
- Inovasi dibidang Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa.

4). *Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023*

- Target PBB Tahun 2023 Kecamatan Pageruyung sebesar Rp. 1.428.837.895,00, terealisasi sebesar Rp. 1.301.815.823,00, dengan capaian kinerja 91,1%. Dari 14 desa yang sudah lunas 100% sebanyak 7 desa.
- Sebagai upaya peningkatan pembayaran PBB dilaksanakan sosialisasi dan monitoring perkembangan pembayaran pajak ke desa-desa oleh Tim intensifikasi PBB
- Selalu memantau perkembangan realisasi PBB melalui sistem.

5). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

- Penyusunan APBDes sering tidak tepat waktu;

- Adanya perubahan regulasi kebijakan yang menghambat penyusunan APBDes
- Keterbatasan SDM Tim Penyusun APBDes
- Budaya cypypaste

Upaya yang telah dilakukan :

- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes bersama Tim Pendamping Desa dan Kecamatan;
- Mengevaluasi lebih dini konsep APBDes;
- Pendampingan ke desa-desa;
- Melaksanakan Rakor Tingkat Kecamatan dengan mengundang Tim Penyusun APBDes;
- Memaksimalkan sistem yang sudah ada untuk penyusunan APBDes tepat waktu;
- Melibatkan semua unsur yang terlibat dan berkompeten dalam penyusunan APBDes.

b. Bidang Pelayanan Publik

- Keterbatasan SDM;
- Masyarakat belum memahami sepenuhnya dengan sistem pelayanan publik berbasis IT;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengusulkan tambahan SDM;
- Memberikan pembekalan serta peningkatan kemampuan SDM staf yang membidangi pelayanan publik, baik melalui pelatihan formal maupun dalam koordinasi internal kecamatan dengan cara mendorong peningkatan kerjasama antar staf dan para kasi;
- Merencanakan kegiatan penataan organisasi dengan maksud untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyusunan RKPDes belum optimal
- Tim evaluasi yang dibentuk belum berjalan dengan optimal

- Belum tersosialisasikannya secara optimal pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Pemerintahan Desa belum memfasilitasi untuk menampung kegiatan UMKM sebagai wadah bagi peningkatan ekonomi rakyat, sementara masih berjalan individual;
- Terkait dengan peningkatan destinasi wisata, untuk infrastruktur perlu ditingkatkan sebagai akses jalan masuk ke lokasi wisata

Upaya yang telah dilakukan:

- Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan *stake holder* atau dinas terkait;
- Memantau perkembangan program kerja yang turun sehingga dapat berjalan maksimal dan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- Mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan;
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Melakukan koordinasi dan terobosan sebagai upaya peningkatan destinasi wisata;
- Inovasi Digitalisasi Desa Wisata.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target keluarga sehat dan bebas stunting;
- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- 1) Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dalam hal ini pelayanan perijinan.
- 3) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

- 4) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan forkompincam dalam rangka peningkatan ketertiban masyarakat dengan keterbatasan sarpras
- 2) Mengadakan sosialisasi dan persuasif dengan PKL agar tertib, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sepanjang jalan protokol dan dapatnya berpindah lokasi berjualan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.
- 4) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung komunikasi antara pemerintahan desa dan kecamatan.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Plantungan adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang

belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perasngkat daerah

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Plantungan terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Kedaulatan Pangan
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Plantungan adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
 - Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada
 - Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021) table T-C.31.

Tabel T - C. 31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Pageruyung	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.523.659.472	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Pageruyung	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.524.659.472	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	7.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	8.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.091.536.896	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.091.536.896	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	146.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	146.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	34.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	34.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	88.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	88.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	58.242.576	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	58.242.576	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pageruyung	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pageruyung	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	10.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pageruyung	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pageruyung	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	10.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Pageruyung	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	14.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Pageruyung	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	14.500.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pageruyung	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	108.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pageruyung	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	108.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	108.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	108.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	95.400.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	95.400.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pageruyung	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	2.700.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pageruyung	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	2.700.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	2.700.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	2.700.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Kendal. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Pageruyung berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Pageruyung adalah usulan untuk. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pageruyung

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan	Kec. Pageruyung	Prosentase ketercapaian	100	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pageruyung	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pageruyung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pageruyung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja adm umum Perangkat Daerah	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pageruyung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pageruyung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pageruyung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Pageruyung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pageruyung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pageruyung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pageruyung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pageruyung	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	jumlah koordinas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				

	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pageruyung		100	
	KoordinasiSinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan pemerintahan desa	100	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pageruyung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	100	

			Pendampingan Desa di Wilayahnya		
--	--	--	------------------------------------	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat periode RPJMN 2020-2024, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

A. Arah Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaktif serta inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaktif dan kolaboratif;
5. Mewujudkan pemeritahan yang kolaboratif, melalui perluasan jejaring dan kerjasama daerah.

B. Arah Kebijakan Kabupaten

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah **“Kendal Inclusive”** dengan prioritas pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastuktur yang mantap dan berkeadilan.”. Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
 Persandingan antara Priortas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat periode RPJMN 2020-2024, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya	Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada Prioritas pembangunan	Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah “Kendal Inclusive” dengan prioritas pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastuktur yang mantap dan berkeadilan.”. Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.			
---	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun 2025 mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja PD tahun 2025 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan, rencana kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, bidang pelayanan publik, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta di bidang pemerintahan desa.

Sedangkan sasaran program Kecamatan Pageruyung tahun 2025 secara umum adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal), dalam Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Belanja Langsung dan Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.776.759.472,- yang terbagi ke dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - a.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d.1. Penyediaan Komponen Instalasi;
 - d.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan;
 - d.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya.
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - f.2. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - f.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - f.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g.1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - a.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - b.1. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - a.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Toko Masyarakat.
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b.1. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - a.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - a.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
 - a.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - a.5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - a.6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - a.7. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2025 akan disajikan pada tabel T-C. 33 sebagai berikut :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pageruyung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01				KECAMATAN				2.754.659.472				2.796.889.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Kec. Pageruyung		2.546.149.500				2.575.085.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	dokumen	6.540.000				10.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		4 Dokumen	3.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		2 Laporan	3.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah		12 laporan	2.210.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.210.780.000

7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 orang / bulan	2.112.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.112.500.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja adm umum Perangkat Daerah			140.660.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			133.505.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	7 paket	4.844.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	25 paket	19.488.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.005.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Pageruyung	12 Paket	4.528.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.500.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	858 Paket	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pageruyung	2 Paket	5.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Peraturan-undangan yang disediakan	Kec. Pageruyung	12 Dokumen	1.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pageruyung	12 laporan	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			85.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang		8 Unit	22.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000

						urusan pemerintahan daerah							
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		2 Unit	10.000.000				10.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		2 Unut	12.500.000				12.500.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		2 Unit	1.000.000				2.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pageruyung	5 unit	4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12 bulan	106.366.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.800.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pageruyung	350 laporan	3.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pageruyung	12 laporan	40.720.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	4 laporan	9.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Pageruyung	12 laporan	53.236.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			53.300.000

						Kantor yang Disediakan							
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			25.000.000				100.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		17 Unit	29.803.000	Pendapatan asli Daerah (PAD)			32.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara		2 Unit	1.000.000	Pendapatan asli Daerah (PAD)			2.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		5 unit	24.000.000	Pendapatan asli Daerah (PAD)			50.000.000
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pageruyung	5 Unit	45.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000
7	01	01	2.90	0011									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				700.000				2.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			700.000				2.000.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Pageruyung	50 dokumen	700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				14.500.000				23.000.000

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			13.000.000				20.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pageruyung	16 Laporan	13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			20.000.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.500.000				3.000.000
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan	Kec Pageruyung	16 Pokmas / Ormas	1.500.000				3.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				64.120.000				125.500.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			63.820.000				122.500.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pageruyung	12 laporan	63.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pageruyung	16 laporan	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.500.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan				300.000				3.000.000

					Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pageruyung	16 laporan	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.700.000				17.700.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan pemerintahan desa			2.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.700.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pageruyung	16 dokumen	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.200.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	16 dokumen	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pageruyung	16 dokumen	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas	Kec. Pageruyung	16 dokumen	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000

						Kepala Desa dan Perangkat Desa							
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pageruyung	1 dokumen	600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.000.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Pageruyung	16 dokumen	300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.500.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pageruyung	16 laporan	600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catatan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator knerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Kecamatan Pageruyung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pageruyung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor
	kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Skor

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau

pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pageruyung Tahun 2025 sebagaimana tersebut dibawah :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Kendal
Tahun 2025

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN
PAGERUYUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000
KECAMATAN PAGERUYUNG

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN PAGERUYUNG												2.776.759.47 ₂	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												2.776.759.47 ₂	
7	01				KECAMATAN												2.776.759.47 ₂	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2.524.659.47 ₂	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												8.500.000	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												5.000.000	
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusanPerangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggara n evaluasi yang tersusun	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Pageruyung, Pageruyung	100 % 100.00 %	4 Dokum en	4 Dokumen	4.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	4 Dokum en	5.000.000

7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								3.000.000					3.500.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	4 Laporan	4 Dokumen	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.500.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.189.816.896					2.189.816.896
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								2.091.536.896					2.091.536.896
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	14 Orang/bulan	26 Laporan	2.091.536.896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.091.536.896
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN								98.280.000					98.280.000
						Jumlah dokumen hasil, Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi pelaksana Tugas ASn	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100%	12 Dokumen		98.280.000					98.250.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								146.600.000					146.600.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								5.000.000					8.000.000

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	7 Paket		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								10.000.000					10.000.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	27 Paket		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								8.000.000					8.000.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	14 Paket	6 laporan	8.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	8.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								36.500.000					36.500.000

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	450 Paket	6 laporan	36.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.500.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								5.100.000					5.100.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	2 Paket	6 laporan	5.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.100.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								82.000.000					82.000.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan dokumen administrasi umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 laporan	82.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	82.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34.000.000					34.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								10.000.000					10.000.000

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan yang tersedia	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	5 Unit	0 0	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								88.000.000					87.500.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								3.000.000					3.000.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	300 Laporan	12 Bulan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								38.000.000					38.000.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	38.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								9.000.000					9.000.000

						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	3 Laporan	12 Bulan	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								40.500.000					40.500.000
						Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100.00 %	12 Laporan	12 Bulan	40.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.500.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								58.242.576					58.242.576
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								10.000.000					10.000.000
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100.00 % 100 %	5 Unit	1 unit	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan								37.242.576					37.242.576

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas	Kab.Kendal Pageruyung, semua Kel/Desa	100%	17 Unit		37.242.576	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kendaraan Dinas Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan di bayarkan		37.242,576
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya								1.000.000					1.000.000
						Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya		Kab. Kendal. Pageruyung, Semua Kel/Desa	100%	2 Unit		1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara		1.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								10.000.000					10.000.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								10.000.000					10.000.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan								10.000.000					10.000.000
						Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan Jumlah dokumen pelayanan yang tercetak Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah dokumen pelayanan umum yang dikeluarkan Jumlah dokumen pelayanan yang dikeluarkan	- Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	14 Laporan 200 dokumen 100 %	14 Dokumen	200 Dokumen 200 dok	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak n	14 Dokumen	10.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								47.400.000					47.400.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								47.400.000					47.400.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								15.500.000					15.500.000

						Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah laporan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	50 %	14 Lembaga Kemasyar akatan	14 desa	15.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Desa	16 Lembaga Kemasyar akatan	15.500.000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan								12.900.000					12.900.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaab Masyarakat di Wilayah Kecamatan								27.000.000					27.000.000
						Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah Pokmas /Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	50 %	14 Laporan	14 desa	27.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	27.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								108.000.000					108.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								12.600.000					12.600.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								12.600.000					12.600.000
						Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	14 Laporan	14 desa 2 laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	

7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								300.000					2.500.000
						Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah desa yang dimonitor Jumlah laporan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	16 Laporan	16 desa 2 laporan	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Laporan	2.500.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa								95.400.000					95.400.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								95.400.000					95.400.000
							<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>		- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Laporan	14 desa 12 laporan	95.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12Laporan	95.400.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								20.000.000					20.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								20.000.000					20.000.000
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional								20.000.000					20.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								45.600..000					45.600.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								45.600.000					45.600.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								4.200.000					5.300.000

						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 %	14 Dokumen	14 Desa	4.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	5.300.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								15.000.000					35.000.000
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 %	14 Dokumen	14 Desa	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	35.000.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								10.000.000					10.000.000
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 %	14 Dokumen	14 Desa	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	10.000.000
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa								300.000					2.000.000
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	16 Desa	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	2.000.000

7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa							1.400.000					1.400.000	
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 %	14 Dokumen	14 Desa	1.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14 Dokumen	1.400.000
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Desa							15.000.000					15.000.000	
						Persentase Penyusunan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	100 %	14 Laporan	14 Desa	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	15.000.000
TOTAL													2.754.659.472					2.776.759.472.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dimana implikasinya Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisis RENJA yang ada, Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2023 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

CAMAT PAGERUYUNG

CASPURI,S.Sos.

Pembina Tk.I

NIP. 19670917 198607 1 001

L A M P I R A N

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan Rancangan RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10. a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10. b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10. c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10. d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	JenisKegiatan	HasilPengendaliandanEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

CAMAT PAGERUYUNG

CASPURI,S.Sos.

Pembina Tk.I

NIP. 19670917 198607 1 001